

LITERASI PASAR MODAL MASYARAKAT INDONESIA

CAPITAL MARKET LITERATION OF INDONESIAN SOCIETY

Suparman Zen Kemu

(Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan,
Jl. Dr Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, 10710;
email: tiarema2000@gmail.com)

Naskah Diterima: 15 Maret 2016, direvisi: 20 Juni 2016,
disetujui: 30 Juni 2016

Abstract

The objectives of this study are: (i) to find out how low is the literacy levels of Indonesian society regarding the capital markets, (ii) to examine the causes of low literacy levels, (iii) to determine what policies have been and will be made by the government and capital market authority. Methods of data collection are by using literature as well as other sources. While the analysis is performed by using tables, graphs, images and descriptive qualitative approach. The findings of this study are: First, the level of literacy of society regarding the capital markets is very low and is lowest in the financial sector resulted in low public participation in the capital market. Second, the causes of the low level of community literacy in the capital market are: (i) Most people assume that to trade in the stock market requires a big amount of capital (hundreds millions or billion of rupiah), (ii) lack of technical knowledge of capital markets, (iii) public perception that the exchange transaction in capital market is a gamble and it contains usury and its Legal is illegitimate (haram), (iv) the existence of the events that harm the investors' shares in the stock due to fraud committed by the brokerages in the past lead to a false perception in the community that play stocks is vulnerable to fraud, (v) the amount and quality of human resources in the Financial Service Authority (FSA) and Self Regulatory Organization (SRO) are inadequate in improving literacy levels of society to capital markets. Third, the government has made some policies in order to improve the literacy of society regarding the capital markets, such as: (i) a FSA trilogy of policy instruments that are financial inclusion, financial literacy (including capital markets), and consumer protection, (ii) the three pillars of the National Strategy for Literacy Financial, namely financial literacy, strengthening of infrastructure for financial literacy, and the development of financial products and services, (iii) the inclusion of local government and non-governmental organization to undergo a socialization of the financial sector and the capital market to the public good that is done by the Indonesian Stock Exchange (BEI), Indonesia's Central Securities Depository (KSEI), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI,) and other non-government community agencies, such as the banking and non-profit organization.

Keywords: Capital market, Indonesia, literacy, FSA, SRO.

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah: (i) Untuk mengkaji seberapa rendah tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal, (ii) Untuk mendiskusikan penyebab rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal, (iii) Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah dibuat dan akan dibuat oleh pemerintah dan otoritas pasar modal. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan studi pustaka. Sedangkan analisis dilakukan melalui penggunaan tabel, grafik, gambar dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Temuan dari kajian ini adalah: Pertama, tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal sangat rendah bahkan terendah di sektor keuangan sehingga berakibat rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pasar modal. Kedua, penyebab dari rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal adalah: (i) Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa untuk bertransaksi di pasar modal memerlukan modal besar (ratusan juta bahkan miliaran rupiah), (ii) kurangnya pengetahuan teknis mengenai pasar modal, (iii) persepsi masyarakat bahwa transaksi di bursa pasar modal bersifat judi dan mengandung riba dan hukumnya haram, (iv) adanya kejadian-kejadian yang merugikan para investor saham di bursa akibat adanya penipuan yang dilakukan oleh para pialang dimasa lalu menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat bahwa bermain saham di bursa rentan terhadap penipuan, (v) jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Self Regulatory Organization (SRO)* yang belum memadai dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal. Ketiga, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat terhadap pasar modal seperti: (i) trilogi instrumen kebijakan OJK yaitu inklusi keuangan, literasi keuangan (termasuk pasar modal) dan perlindungan konsumen, (ii) kebijakan tiga pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan yakni: literasi keuangan, penguatan infrastruktur literasi keuangan dan pengembangan produk dan jasa keuangan, (iii) penyertaan pemerintah daerah dan institusi non pemerintah dalam melakukan sosialisasi sektor keuangan dan pasar modal kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan lembaga masyarakat non pemerintah lainnya seperti perbankan dan organisasi nir laba.

Kata Kunci: Pasar Modal, Indonesia, Literasi, FSA, SRO.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pada tahun 2014 rasio kapitalisasi pasar modal Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto

(PDB) adalah 47.5 persen. Angka ini masih sangat rendah dibandingkan dengan empat negara ASEAN lainnya yaitu Singapura 244.5 persen, Malaysia 135.8 persen, Thailand 106.3 persen dan Philipina 91.9 persen (tabel 1).

Tabel 1. Kapitalisasi Pasar Modal ASEAN terhadap PDB

Negara	2011	2012	2013	2014
Indonesia	43.7	46.7	38.1	47.5
Malaysia	132.8	148.4	154.8	135.8
Philipina	73.6	91.7	79.9	91.9
Singapura	217.3	263.9	246.3	244.5
Thailand	72.4	98.1	84.3	106.3

Sumber: Bank Dunia.¹

Rendahnya rasio kapitalisasi pasar modal Indonesia terhadap PDB, diduga berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat di pasar modal yaitu hanya 0.35 persen dari jumlah penduduk. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk Malaysia yang sudah berpartisipasi di pasar modal mencapai 20 persen. Faktor lain yang diduga menjadi penyebab masih rendahnya literasi masyarakat terhadap pasar modal adalah masih belum optimalnya langkah-langkah pemerintah dan otoritas pasar modal dalam mengembangkan pasar modal di Indonesia misalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peluang berinvestasi di pasar modal yang menguntungkan.² Dari sisi masyarakat terlihat kalau pemahaman mereka terhadap pasar modal masih rendah (*illiterate*) terbukti dari adanya persepsi yang salah dari sebagian masyarakat terhadap pasar modal.³ Disamping itu masyarakat juga merasa lebih nyaman menginvestasikan modalnya pada bidang usaha yang telah mereka kenal selama ini seperti usaha pada sektor riil dan menabung baik di bank maupun menyimpan logam mulia dan membeli tanah.

Beberapa fenomena yang telah penulis uraikan diatas memicu minat penulis untuk mengetahui dengan persis apa yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi di pasar modal.

B. Permasalahan

Menurut data yang penulis peroleh dari berbagai sumber diantaranya OJK, rendahnya tingkat literasi pasar modal ini berkaitan dengan adanya pengertian yang salah dari sebagian besar masyarakat terhadap pasar modal. Menurut mereka transaksi di pasar modal bersifat judi (tidak halal), membutuhkan

modal yang besar (hanya cocok untuk orang kaya saja) dan banyak penipuan yang terjadi sehingga uang diinvestasikan di pasar modal bisa hilang. Berbagai persepsi yang keliru ini perlu diluruskan agar pengertian masyarakat terhadap pasar modal tidak *misleading* yang menimbulkan kerugian pada masyarakat itu sendiri karena menutup peluang mereka untuk memperoleh keuntungan dari investasi di pasar modal dan juga menutup kemungkinan bagi emiten untuk mendapatkan tambahan modal dari pasar modal.

Pihak yang paling bertanggungjawab terhadap adanya persepsi yang keliru di masyarakat terhadap pasar modal yang bermuara kepada rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal adalah pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta beberapa pihak lainnya seperti Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari berbagai permasalahan tersebut beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dicari jawabnya adalah:

1. Seberapa rendah tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal?
2. Apa penyebab rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal?
3. Kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah dan otoritas pasar modal?

C. Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini adalah: (i) Untuk mengetahui seberapa rendah tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal, (ii) Untuk mengetahui penyebab rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal, (iii) Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah dan otoritas pasar modal.

D. Teori / Kerangka Pemikiran.

1) Pengertian Literasi Dan Literasi Pasar Modal.

Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Istilah literasi sebelumnya jarang dipakai karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata literasi memang tidak ada. Namun, dalam konteks saat ini, kata literasi sudah sering digunakan. Literasi memiliki arti yang sangat luas, bisa berarti melek teknologi, melek politik, berpikiran kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat.⁴

¹ "Market capitalization of listed domestic companies (% of GDP)", (*online*), (<http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS>, diakses pada 10 Maret 2016).

² Fudji Sri Mar'ati, "Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok Dan Proses Go Public)", *Among Makarti*, Vol.3 No.5 Juli 2010.

³ Seri Murni, Muhammad Arfan, dan Said Musnadi, "Pengaruh Earning per Share dan Net Profit Margin terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3 No. 1, Februari 2014, 38-49.

⁴ Irwin S. Kirsch, and Ann Jungeblut, *Literacy: profiles of America's young adults*, New Jersey: National Assessment of Educational Progress, 1993, hal.150.

Literasi pasar modal yang merupakan bagian dari literasi keuangan adalah pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya atau *knowledge and ability*.⁵ Ada juga yang mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola sumber daya keuangan guna mencapai kesejahteraan. Pada kajian ini istilah literasi pasar modal dan literasi keuangan penggunaannya *interchangeable*, atau bisa digunakan untuk pengertian yang sama sepanjang tidak secara spesifik dinyatakan sebagai istilah perbankan, asuransi, dana pensiun, pegadaian dan lain-lain.

Sufficient Literate adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban, terkait produk dan jasa keuangan. *Less Literate* adalah masyarakat yang hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. Sedangkan *Illiterate* adalah masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan⁶.

“college students are not knowledgeable about personal finance. The incompetency will limit their ability to make informed financial decisions. Together with evidence provided by the research conducted in the past three decades, the findings of this study suggest that there is a systematic lack of personal finance education in our education system. The lack of education has resulted in serious financial illiteracy found in the American public. The illiteracy and its costly consequences have made individuals worry about their finances to the extent that their productivity in workplaces is affected (CHRG, 1995). When individuals cannot manage their finances, it becomes a problem for the society”.

Dari berbagai definisi tentang literasi dan literasi keuangan di atas, peran literasi keuangan adalah penting dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat karena literasi keuangan merupakan salah satu instrumen untuk menuju masyarakat sejahtera. Dengan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai lembaga keuangan, maka keputusan-keputusan keuangan yang diambil konsumen dan masyarakat menjadi lebih baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh World Bank, semakin tinggi pemahaman mengenai literasi keuangan (*well literate*) suatu negara, maka pertumbuhan per kapitanya akan semakin meningkat. Literasi keuangan juga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk, manfaat dan risiko jasa keuangan. Selain itu, literasi keuangan bisa meningkatkan keterampilan dalam mengelola jasa keuangan dan meningkatkan *‘market confidence’* atau keyakinan bahwa uang yang disimpan di lembaga jasa keuangan itu dikelola dengan baik dan aman atau *secure*.⁸

Alur berfikir dalam tulisan ini adalah mengidentifikasi pengertian, kondisi literasi masyarakat terhadap pasar modal, kemudian diidentifikasi penyebab dari tingkat literasi masyarakat, akibat dari tingkat literasi, peranan pemerintah/otoritas pasar modal dalam meningkatkan literasi masyarakat, langkah-langkah yang dilakukan pihak terkait, hambatan yang ditemui dan langkah-langkah yang masih perlu dilakukan otoritas pasar modal (gambar 1).

Gambar 1.

Literasi Pasar Modal.



Sumber: Disarikan oleh penulis dari berbagai sumber.

Kondisi literasi masyarakat Indonesia yang rendah terhadap sektor keuangan khususnya pasar modal menyebabkan partisipasi mereka di pasar modal juga rendah. Hal ini normal karena tidak mungkin masyarakat melakukan investasi di pasar modal kalau mereka sendiri lebih mengenal sektor riil sebagai lahan bisnis. Masyarakat lebih nyaman berbisnis dengan membuka toko kelontong atau warung makan daripada melakukan investasi di bursa saham yang asing bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Apalagi persepsi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal terlanjur kurang

⁵ Lusardi & Mitchell, “Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education”, *Business Economics*, January 2007, p-35.

⁶ Kardinal, “Kontribusi Literasi Keuangan Terhadap Penggunaan Produk Keuangan Pada Masyarakat Indonesia”, *Proceeding Sriwijaya Economic and Business Conference*, STIE Multi Data Palembang, 2015.

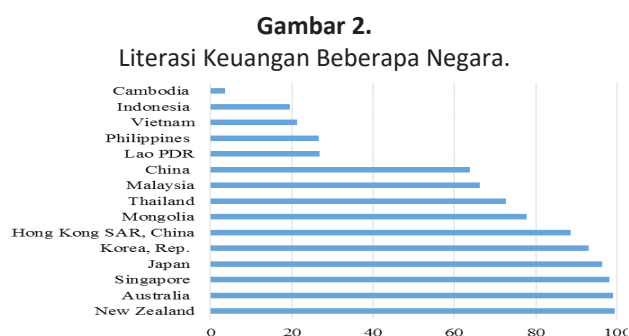
⁷ Haiyang Lusardi and Ronald P. Volpe, “An analysis of personal financial literacy among college students”, *Financial Services Review Volume 7*, Issue 2, 1998, hal. 107-128.

⁸ “Memperkuat Pengawasan Keuangan Melalui Literasi Masyarakat”, (*online*), (<http://jatim.antaranews.com/lihat/berita/143074/memperkuat-pengawasan-keuangan-melalui-literasi-masyarakat>), diakses pada 10 Maret 2016).

baik karena melakukan investasi di pasar modal dapat menyebabkan kebangkrutan dan beresiko tinggi. Belum lagi ada pandangan dari sisi agama bahwa bermain saham identik dengan judi karena mengandung ketidakpastian yang tinggi. Walau sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa bermain saham itu halal, namun sebagian masyarakat tetap meragukan kehalalannya.

2) Literasi Keuangan Beberapa Negara.

Data menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat dari persentase orang dewasa yang memiliki rekening di institusi keuangan formal (Gambar 2), yang hanya mencapai kurang lebih 20 persen dari seluruh populasi orang dewasa, di atas Kamboja di bawah Vietnam. Bandingkan dengan Singapura, Australia dan New Zealand yang sudah mendekati 100 persen, atau Thailand di atas 70 persen dan Malaysia yang sudah diatas 60 persen.



Sumber: World Bank 2011.⁹

Pada gambar 2 tersebut tingkat literasi keuangan Indonesia hanya berada diatas *Cambodia* namun masih dibawah *Vietnam*, *Philippines* dan *Lao People Democrate Republic*. Padahal secara ekonomi yang

otoritas jasa keuangan dalam membuat masyarakat Indonesia lebih melek terhadap sektor keuangan.

3) Kondisi Literasi Masyarakat Indonesia Terhadap Sektor Keuangan.

Menurut hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diklasifikasikan berdasarkan gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, strata wilayah dan strata sosial, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia, termasuk pasar modal, masih rendah. Hasil Survei Literasi Keuangan yang dilakukan terhadap 8.000 responden atau sekitar 400 responden tiap provinsi itu, menemukan bahwa hanya 21,84 persen penduduk Indonesia yang tergolong "*well literate*". Artinya, ada 22 orang dari 100 orang yang disurvei memiliki pengetahuan yang baik tentang lembaga keuangan serta produk dan jasanya, termasuk manfaat, risiko serta hak dan kewajibannya. Sementara sisanya tergolong "*sufficient literate*" (75.69 persen), "*less literate*" (2.06 persen) dan "*not literate*" (0.41 persen).

Survei juga dilakukan berdasarkan pengelompokan lima strata sosial, yaitu Kelas A dengan penghasilan lebih dari Rp1.750.000, Kelas B berpenghasilan Rp1.250.000-Rp1.750.000, Kelas C dengan pendapatan Rp600.000-Rp1.250.000, Kelas D berpenghasilan Rp400.000-Rp600.000 dan Kelas E kurang dari Rp400.000, hasilnya adalah semakin tinggi strata sosial, semakin tinggi pula literasi keuangannya. Masyarakat dengan strata sosial Kelas A memiliki Indeks Literasi Keuangan paling tinggi, yaitu 51,6 persen, sementara masyarakat strata sosial Kelas E hanya memiliki indeks literasi keuangan 28,4 persen¹⁰.

Berdasarkan data pada tabel 2 terlihat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia berdasarkan sub sektor keuangan. Perbankan adalah sub sektor yang paling tinggi tingkat literasinya, diikuti oleh sub

Tabel 2. Indeks Literasi Keuangan Indonesia

Tingkat Literasi	Sektor Keuangan					
	Perbankan	Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Dana Pensiun	Pasar Modal	Pegadaian
Well Literate	21.80%	17.84%	9.80%	7.13%	3.79%	14.85%
Sufficient Literate	75.44%	41.69%	17.89%	11.74%	2.40%	38.89%
Less Literate	2.04%	0.68%	0.21%	0.11%	0.03%	0.83%
Not Literate	0.73%	39.80%	72.10%	81.03%	93.79%	45.44%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Meutia Karunia Dewi dkk.¹¹

diukur dari pendapatan per kapita, Indonesia pada posisi diatas *Vietnam*, *Philippines* dan *Lao PDR*. Hal ini bisa dikatakan sebagai kegagalan pemerintah dan

sektor asuransi dan pegadaian. Sementara sub sektor pasar modal adalah yang terendah tingkat literasinya

⁹ Irsyan Maududy, 2015, "Kebijakan Meningkatkan Literasi Keuangan", (*online*), (<http://bemfebui.com>, diakses pada 10 Maret 2016).

¹⁰ "Memperkuat Pengawasan Keuangan Melalui Literasi Masyarakat", (*online*), (<http://jatim.antaranews.com/lihat/berita/143074/memperkuat-pengawasan-keuangan-melalui-literasi-masyarakat>, diakses pada 09 Maret 2016).

ditandai dengan 93.79 persen masyarakat Indonesia pada tingkat *not literate* atau tidak mengenal pasar modal.

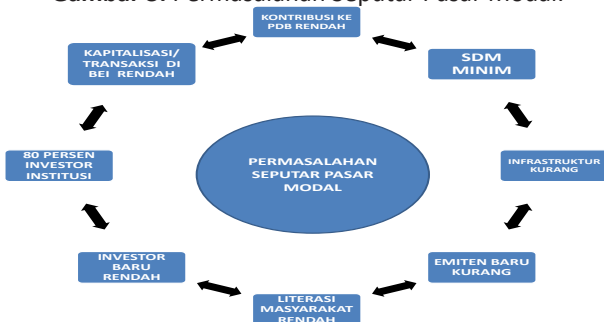
Data ini merupakan umpan balik (*feedback*) bagi otoritas pasar modal untuk bekerja lebih keras lagi agar tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal bisa mengejar tingkat literasi sub sektor keuangan lain yang sudah lebih tinggi seperti sub sektor perbankan dan sub sektor asuransi.

II. PEMBAHASAN

A. Permasalahan Seputar Pasar Modal

Pada gambar 3 dapat dilihat permasalahan di seputar pasar modal yang bersifat siklus walau urutannya tidak harus sama. Masalah tersebut mulai dari kapitalisasi dan transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) rendah, akibatnya kontribusi pasar modal ke Pendapatan Domestik Bruto (PDB) rendah. Hal ini terjadi karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Self Regulatory Organization* (SRO) seperti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), ditambah dengan kurangnya infrastruktur, berlanjut kurangnya emiten yang melakukan *Intial Public Offering* (IPO) atau Penawaran Umum Perdana saham. Dari sisi masyarakat, literasinya terhadap pasar modal masih rendah yang berujung kepada rendahnya investor baru di pasar modal, apalagi sifat investor yang dominan di pasar modal Indonesia adalah investor institusi. Kondisi ini membuat volume kapitalisasi dan transaksi di pasar modal rendah dan akhirnya kontribusi pasar modal terhadap PDB rendah.

Gambar 3. Permasalahan Seputar Pasar Modal.



B. Kepemilikan dan Keterlibatan Masyarakat di Lembaga Keuangan.

Dalam hal kepemilikan, pada tabel 3 dapat diperhatikan bahwa orang dewasa yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal adalah

yang terendah yaitu hanya 20 persen, sangat jauh dibandingkan dengan Singapura 98 persen. Data pada tabel tersebut diatas menunjukkan dengan jelas bahwa dalam hal literasi keuangan, Indonesia merupakan yang terendah dibandingkan dengan empat Negara ASEAN lainnya.

Tabel 3. Orang Dewasa yang memiliki rekening di Lembaga Keuangan

No.	Negara	Persentase
1	Singapura	98
2	Thailand	73
3	Malaysia	66
4	Philipina	27
5	Indonesia	20

Sumber: OJK.

Sedangkan dalam penggunaan produk dan jasa keuangan, terlihat bahwa lembaga jasa keuangan yang paling populer di mata masyarakat Indonesia adalah bank, sedangkan yang paling tidak populer adalah pasar modal. Rendahnya keterlibatan masyarakat di pasar modal yang hanya berada pada 0.10 persen merupakan akibat dari masih rendahnya literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal. Karena itu masih perlu usaha yang lebih keras dari otoritas pasar modal untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap pasar modal dalam rangka mengejar ketinggalan sub sektor keuangan ini dari sub sektor keuangan lainnya seperti perbankan dan asuransi (tabel 4).

Tabel 4. Penggunaan Produk dan Jasa Keuangan

No.	Lembaga Jasa Keuangan	Persentase
1	Perbankan	75.98 persen
2	Perasuransian	13.17 persen
3	Lembaga Pembiayaan	5.30 persen
4	Pegadaian	4.18 persen
5	Dana Pensiun	1.26 persen
6	Pasar Modal	0.10 persen
	Total	100.00 persen

Sumber: OJK

Menurut informasi dari Destry Damayanti pada Isnurhadi,¹² ekonom Bank Mandiri, jumlah penduduk Indonesia yang tergolong dalam kategori *financial inclusion* berjumlah 49 persen. Walaupun ada peningkatan, namun angka *financial inclusion* penduduk Indonesia yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal masih rendah. Dengan tingkat *financial inclusion* sebesar 49 persen tersebut artinya

¹¹ Dewi, Meutia Karunia et.al, "Telaah Finansial Literasi Mahasiswa Feb Universitas Jenderal Soedirman: Suatu Implikasi Pembelajaran Di Perguruan Tinggi," *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015.

¹² Pada Isnurhadi, H, "Kajian Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah. (Studi Kasus: Masyarakat Kota Palembang)", *Laporan Hasil Penelitian*, Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 2013.

Tabel 5. BUMN yang sudah go public

NO	NAMA	KODE	SEKTOR	TGL IPO
1	PT INDO FARMA	INAF	FARMASI	4/17/2001
2	PT KIMIA FARMA	KAEF	FARMASI	7/4/2001
3	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA	PGAS	ENERGI	12/15/2003
4	PT KRAKATAU STEEL	KRAS	INDUSTRI LOGAM	11/10/2010
5	PT ADHI KARYA	ADHI	KONSTRUKSI	3/18/2004
6	PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN	PTPP	KONSTRUKSI	2/9/2010
7	PT WIJAYA KARYA	WIKA	KONSTRUKSI	10/29/2007
8	PT WASKITA KARYA	WSKT	KONSTRUKSI	12/19/2012
9	PT BANK NEGARA INDONESIA	BBNI	BANK	11/25/1996
10	PT BANK RAKYAT INDONESIA	BBRI	BANK	11/10/2003
11	PT BANK TABUNGAN NEGARA	BBTN	BANK	12/17/2009
12	PT BANK MANDIRI	BMRI	BANK	7/14/2003
13	PT ANEKA TAMBANG	ANTM	PERTAMBANGAN	11/27/1997
14	PT BUKIT ASAM	PTBA	PERTAMBANGAN	12/23/2002
15	PT TIMAH	TINS	PERTAMBANGAN	10/19/1995
16	PT SEMEN BATURAJA	SMBR	SEMEN	6/28/2013
17	PT SEMEN INDONESIA	SMGR	SEMEN	7/8/1991
18	PT JASAMARGA	JSMR	SARANA ANGKUTAN	11/12/2001
19	PT GARUDA INDONESIA	GIAA	SARANA ANGKUTAN	2/11/2011
20	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA	TLKM	TELEKOMUNIKASI	11/14/1995

Sumber: Sahamok.com

baru sekitar 122,5 juta orang yang melek perbankan dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia.

Pemerintah masih terus melakukan kegiatan *financial inclusion* terhadap masyarakat, agar lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mengakses dana dari lembaga keuangan, baik dari bank seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan non bank seperti PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

C. Literasi BUMN dan BUMD terhadap Pasar Modal.

Menurut Kementerian BUMN, total aset BUMN telah mencapai Rp 4.500 triliun. Jumlah BUMN sekitar 119 dengan 600 anak usaha pelat merah, Namun baru 20 BUMN (16.8 persen) yang telah mencatatkan sahamnya di BEI (tabel 5). Jadi masih ada sekitar 98 BUMN (83.2 persen) lagi yang bisa didorong untuk *go public* dengan menjual saham mereka di BEI. Sementara itu menurut Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, pada 2014, terdapat 426 BUMD di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 61,74 persen atau 263 perusahaan berbentuk perusahaan dagang (PD), sebanyak 26,53 persen atau 113 perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) dan sisanya dalam bentuk koperasi dan BUMD

dalam bentuk penyertaan saham dengan total aset BUMD lebih dari Rp375 triliun.¹³

BUMN dan BUMD secara ekonomis sangat layak untuk melakukan penambahan modal kerja melalui pasar modal, karena itu jajaran direksinya layak mendapatkan penjelasan lebih intens lagi mengenai peluang pasar modal sebagai sumber pendanaan modal kerja mereka.¹⁴ Dengan melakukan penerbitan (*issuance*) saham di BEI, maka BUMN/BUMD akan dapat menambah modal kerja mereka yang akan memberi efek akselerasi yang lebih besar kepada perekonomian. Sepengetahuan penulis, sampai saat ini baru ada dua BUMD yang sudah *go public* yang kebetulan kedua-duanya adalah bank yaitu Bank Jabar dan Bank Jatim.¹⁵

Untuk itu, literasi pasar modal seyogyanya tidak hanya diarahkan kepada masyarakat umum seperti ibu rumah tangga, mahasiswa dan anak-anak, tetapi juga perlu diarahkan kepada badan usaha milik negara

¹³ Jauhari Mahardika, "BEI Gencar Tingkatkan Literasi Pasar Modal", (*online*), (<http://www.beritasatu.com/edukasi/332843-workshop-di-yogyakarta-bei-gencar-tingkatkan-literasi-pasar-modal.html>). Diakses pada 17 Maret 2016.)

¹⁴ Endang Mulyadi, S.Pd. "Pasar Modal Berbasis Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X", *Modul Pembelajaran*, SMA Negeri I Ciamis, 2008.

¹⁵ "Perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia", (*online*), (<http://www.sahamok.com/perusahaan-publik-terbuka-tbk-emiten-bei-bursa-efek-indonesia/>), diakses tanggal 17 Maret 2016)

dan daerah (BUMN dan BUMD) karena masih banyak BUMN ataupun anak usaha dari BUMD yang belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peningkatan literasi BUMN dan BUMD terhadap pasar modal akan dapat meningkatkan kapitalisasi pasar modal Indonesia sehingga akan lebih berkontribusi terhadap tumbuhnya perekonomian domestik. Untuk itu kedepan OJK dan SRO (Bursa Efek Indonesia-BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia-KPEI, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia-KSEI), layak menjadikan BUMN dan BUMD ini sebagai target sosialisasi mengenai pasar modal.

Pada tabel 5 terlihat ke 20 BUMN yang sudah *go public*. Sektor yang paling banyak *go public* adalah bank dan konstruksi (masing-masing tiga perusahaan). Sedangkan sektor lainnya yang *go public* adalah sektor energi, industri logam dan telekomunikasi (masing-masing satu perusahaan).

D. Penyebab Rendahnya Literasi Masyarakat Terhadap Pasar Modal

Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal tidak terlepas dari rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap sektor keuangan, dimana pasar modal merupakan sub sektor dari sektor keuangan, bersama dengan sub sektor yang lain seperti perbankan, asuransi, dana pensiun dan *multi finance*.

Beberapa penyebab dari rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur keuangan. Sebagai contoh, bisa dilihat dari jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Jumlah ATM di Indonesia pada tahun 2013 masih kalah jika dibandingkan jumlah ATM di China dan Brasil.¹⁶ Pertumbuhan transaksi ATM saat ini hanya sekitar 50 persen hingga 52 persen per tahun. Contoh lain dari rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur adalah seperti yang terjadi di Merauke, Papua. Berdasarkan laporan di media masa, transaksi menggunakan *credit card* harus menunggu sampai tiga menit untuk menyelesaikan transaksi dan setelah ditunggu, ternyata transaksi gagal.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, bank sentral perlu mendorong interoperabilitas atau kemampuan ATM untuk menampung transaksi dari kartu ATM bank lain (penyebaran ATM bersama). Hal ini akan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan perbankan dari sisi *fee based income*. Beberapa hambatan

masyarakat menabung di bank adalah jarak dan sarana transportasi yang belum memadai. Bisa jadi antara biaya untuk pergi ke bank dengan jumlah uang yang ditabung tidak seimbang (hal ini menjadi salah satu sebab rendahnya minat masyarakat di pedesaan untuk menabung di bank). Kalau melihat kondisi literasi masyarakat terhadap sektor keuangan yang seperti ini, maka literasi masyarakat terhadap pasar modal terasa semakin jauh.

- 2) Rendahnya pemahaman seputar layanan jasa keuangan. Masih banyak masyarakat yang beranggapan perbankan dan pasar modal hanya untuk masyarakat kaya. Langkah yang perlu dilakukan selama ini untuk mengubah anggapan tersebut adalah masuk ke komunitas masyarakat. Pemerintah dalam hal ini OJK, perlu memberikan pengenalan seputar perbankan dan pasar modal lewat arisan ataupun pengajian misalnya.
- 3) Penyebab lain dari rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia adalah banyaknya penduduk yang tidak memiliki uang (79 persen), tidak memiliki pekerjaan (9 persen) dan tidak merasakan manfaat dari kepemilikan rekening di bank (4 persen). Masih ada lagi penyebab lainnya, yaitu tidak layaknya masyarakat mendapatkan pinjaman (60 persen), tidak mau meminjam (20 persen) dan tidak memiliki jaminan (4 persen).¹⁷

Sedangkan rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal terlihat dari pemahaman masyarakat yang keliru terhadap pasar modal yang merupakan cermin dari rendahnya tingkat literasi mereka terhadap pasar modal sebagaimana butir-butir berikut:

- (i) Pada sebagian masyarakat ada anggapan bahwa untuk bertransaksi di pasar modal memerlukan modal besar (ratusan juta bahkan miliaran rupiah), sehingga dengan modal mereka yang kecil menurut mereka adalah mustahil untuk bertransaksi di pasar modal. Hal ini tentu saja salah karena untuk bertransaksi di pasar modal tidak harus dengan modal yang besar, karena ada beberapa perusahaan pialang (*brokerage*) yang menerima nasabah dengan setoran cukup satu juta rupiah saja. Apalagi saat ini OJK telah membuat kebijakan mengenai pengurangan lembar saham per lots yang dulunya 500 lembar per lot menjadi 100 lembar saham per lot. Hal

¹⁶ "Jumlah ATM Indonesia masih kalah dibandingkan China dan Brasil", (*online*), (<http://www.merdeka.com>, *online*, diakses pada 5 Maret 2016).

¹⁷ H. Isnurhadi, "Kajian Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus: Masyarakat Kota Palembang)," *Laporan Hasil Penelitian*, Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 2013.

ini menyebabkan nilai transaksi per lot menjadi turun, misalnya dari dulunya 500 ribu rupiah menjadi cukup dengan 100 ribu rupiah saja.

- (ii) Kurangnya pengetahuan teknis mengenai pasar modal, misalnya ada orang yang secara sepintas tahu mengenai teori pasar modal namun mereka tidak tahu bagaimana cara ikut berinvestasi di pasar modal. Mereka ini beranggapan bahwa untuk ikut bertransaksi di pasar modal memerlukan persyaratan dan prosedur yang berbelit-belit, padahal saat ini untuk berinvestasi di pasar modal sangatlah mudah. Cukup mereka menghubungi salah satu pialang (*brokerage*), mendaftarkan namanya, membuka rekening dengan jumlah yang tidak terlalu besar, bahkan bisa hanya dengan satu juta rupiah saja, kemudian memilih cara *trading* (transaksi), dengan cara *online trading* atau dengan cara biasa (*manual*) yaitu transaksi dilakukan melalui pialang.¹⁸
- (iii) Adanya persepsi dari masyarakat bahwa transaksi di pasar modal bersifat judi dan mengandung riba yang hukumnya haram.¹⁹ Hal ini sebenarnya sudah dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 80, tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Regular Bursa Efek. MUI dengan fatwa tersebut mencantumkan 14 hal di bursa efek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dimana sebagian besar larangan tersebut sama dengan yang sudah diterapkan di Bursa Efek Indonesia. Larangan itu antara lain adalah larangan *front running*, memberikan informasi yang menyesatkan, perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan (*wash sale*), *pre-arrange trade*, *pooling of interest*, *cornering*, *marking at the close*, *insider trading*, serta penawaran palsu. Selain itu terdapat dua tambahan larangan dari larangan yang telah

diketahui para investor di pasar modal, yaitu *short selling* dan *margin trading*.²⁰

- (iv) Adanya kejadian-kejadian yang merugikan para pemain saham di bursa akibat adanya penipuan yang dilakukan oleh para pialang dimasa lalu menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat bahwa bermain saham di bursa rentan terhadap penipuan. Apalagi masyarakat mengaitkan pasar modal dengan penipuan pada investasi bodong yang telah memakan banyak korban, padahal kedua jenis investasi ini jelas sangat berbeda. Terjadinya penipuan di pasar modal pada masa lalu sangat mustahil terjadi pada masa kini, karena dengan telah berfungsinya OJK dalam mengawasi transaksi di pasar modal dan peran KSEI serta KPEI di BEI dalam proses *clearing* dan penyelesaian transaksi (*settlement*), maka terjadinya penipuan di pasar modal bisa dikatakan hampir mustahil.

E. Hambatan Dalam Meningkatkan Literasi Terhadap Pasar Modal.

Pengembangan pasar modal di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala yang sebaiknya segera diselesaikan agar perkembangan pasar modal ke depan dapat berjalan lebih baik. Kendala tersebut antara lain berupa (i) penyediaan infrastruktur pasar modal, (ii) kemampuan menambah investor baru, (iii) kemampuan menambah jumlah perusahaan tercatat melalui penawaran umum perdana saham (IPO) dan (iv) tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal yang rendah. Infrastruktur pasar modal yang mendukung akan memberikan jaminan kepada investor untuk berinvestasi lebih efisien dan aman. Masih kurang tersedianya SDM yang memadai di lapangan (baik di OJK maupun SRO) juga menjadi kendala utama pelaksanaan sosialisasi dalam rangka meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal (Muliaman Hadad).²¹

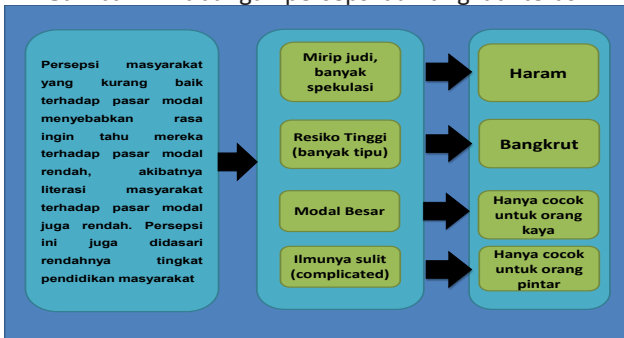
¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan. Ayo Investasi, Mengenal Pasar Modal Lebih Dekat.

¹⁹ Di dalam kitab *al-Mabsuuth*, Imam Sarkhasiy menyatakan bahwa riba adalah *al-fadllu al-khaaliy 'an al-'iwadl al-masyruuth fi al-bai'* (kelebihan atau tambahan yang tidak disertai kompensasi yang disyaratkan di dalam jual beli). Di dalam jual beli yang halal terjadi pertukaran antara harta dengan harta. Sedangkan jika di dalam jual beli terdapat tambahan (kelebihan) yang tidak disertai kompensasi, maka hal itu bertentangan dengan perkara yang menjadi konsekuensi sebuah jual beli, dan hal semacam itu haram menurut syariat. "Riba: Definisi, Hukum, Dan Macamnya", (*online*), (<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/20/riba-definisi-hukum-dan-macamnya/>), diakses pada 19 Maret 2016)

²⁰ Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian terminology-terminology tersebut bisa dilihat pada buku-buku mengenai pasar modal serta berbagai topik mengenai pasar modal di website. Pada tulisan ini tidak akan dijelaskan secara detail karena akan memakan tempat yang panjang dan membuat rancu topik pembahasan dari tulisan ini.

²¹ "Tingkatkan Kualitas SDM, OJK Gandeng BNSP", (*online*, (hukumonline.com, *online*), diakses pada 17 Maret 2016).

Gambar 4. Hubungan persepsi dan tingkat literasi.



Diolah dari berbagai sumber.

Pada gambar 4 terlihat alur pikir masyarakat yang menyebabkan pasar modal sulit berkembang. Masyarakat tidak tertarik untuk mempelajari cara berinvestasi di pasar modal karena mereka telah berprasangka buruk (*prejudice*) terlebih dahulu terhadap pasar modal. Misalnya apakah investasi di pasar modal tidak haram, apakah bukan judi (spekulasi), resiko investasi sangat tinggi dan bisa membuat bangkrut, perlu modal yang besar, banyak penipuan, perlu pengetahuan khusus yang sulit dipelajari.

Masyarakat lebih suka menabung karena merasa lebih aman, walau hasil yang didapat tidak begitu tinggi. Bahkan kalau dikurangi dengan tingkat inflasi bisa jadi *net returnnya* sangat rendah. Namun mengubah pola pikir masyarakat dari hanya menabung menjadi investasi di pasar modal tidak dapat dilakukan dengan mudah. Masyarakat cenderung lebih nyaman menabung dalam bentuk tanah dan emas ketimbang investasi di pasar modal. Hal ini sejalan dengan tingkat literasi pasar modal masyarakat yang rendah. Menghadapi hal ini BEI terus melakukan perbaikan untuk mengajak masyarakat berinvestasi di pasar modal. Namun, usaha tersebut rupanya masih terkendala oleh beberapa faktor khususnya ketersediaan SDM yang memadai di BEI, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Untuk itu sebaiknya BEI bisa melakukan studi banding mengenai proses pengembangan pasar modal dari negara maju, yang kondisi pasar modalnya sudah jauh lebih baik dari pasar modal Indonesia. Pengalaman negara maju dalam mengembangkan pasar modalnya akan membantu BEI untuk mengembangkan pasar modal yang semakin baik dan semakin dikenal oleh masyarakat di kemudian hari. Misalnya dengan cara melakukan *national campaign* dan memasukkan pelajaran mengenai pasar modal pada kurikulum sekolah mulai dari tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi.

Pada intinya, sosialisasi adalah langkah terbaik untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat mengenai pasar modal yang hasilnya akan menambah

minat masyarakat untuk menjadi investor lokal. Selain itu, budaya masyarakat yang masih terbiasa dengan investasi dalam bentuk tanah dan emas juga perlu dipengaruhi agar beralih ke investasi di pasar modal. Masyarakat memang cenderung memilih investasi yang gampang (*simple*), karena bagi mereka investasi saham itu sulit dan ruwet (*complicated*). Padahal, seandainya masyarakat mau belajar, mereka akan mengerti bahwa berinvestasi di pasar modal itu tidak begitu sulit.

F. Akibat dari Rendahnya Literasi Masyarakat.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang besar pula. Apalagi kalau ditunjang dengan masyarakatnya yang memahami produk-produk keuangan, terutama produk investasi di pasar modal seperti saham. Dengan memahami produk investasi di pasar modal, masyarakat tidak hanya mengkonsumsi berbagai produk, tetapi bisa memupuk dana untuk mempertahankan bahkan meningkatkan daya beli yang nantinya akan berakselerasi dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan mereka.

Sayangnya, jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar (sekitar 254 juta jiwa), tidak diikuti dengan pemahaman mereka terhadap sektor keuangan, khususnya pasar modal. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pasar modal hanya sekitar 3.77 persen saja dan dari jumlah itu hanya 0,2 persen saja (508 ribu orang) yang telah melakukan investasi di pasar modal. Hal ini membuktikan bahwa rendahnya literasi (pemahaman) masyarakat terhadap pasar modal akan berakibat pada rendahnya partisipasi mereka di pasar modal.

Rendahnya keterjangkauan dan literasi keuangan masyarakat telah menjadi keprihatinan banyak negara, termasuk negara maju. Negara yang tergabung dalam G-20 dan forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menempatkan program inklusi dan literasi keuangan sebagai prioritas. Bahkan di Amerika Serikat dibentuk Dewan Penasihat Presiden Bidang Literasi Keuangan.

Berbagai cara telah dilakukan untuk menyukseskan program inklusi dan literasi keuangan khususnya melalui pendidikan dan sosialisasi. Namun selama ini program pendidikan dan sosialisasi sektor keuangan belum dilakukan secara *massive* tapi masih sebatas program belas kasihan atau masuk dalam tanggung jawab sosial perusahaan

Gambar 5. Trilogi Instrumen Kebijakan OJK.

Trilogi kebijakan = **Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan Dan Perlindungan Konsumen**, diimplementasikan dengan tujuan akhir mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.



Sumber: Muliaman Hadad (OJK).

(CSR). *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya²². Idealnya pendidikan keuangan merupakan bagian dari bisnis suatu lembaga keuangan, karena pada akhirnya nanti lembaga keuanganlah yang akan memetik hasilnya. Artinya pihak perbankan dan pasar modal (BEI) perlu mengalokasikan sejumlah biaya untuk keperluan literasi produk mereka, tidak hanya kegiatan tambahan yang bersifat non bisnis (sosial saja).

Selain pendidikan dan sosialisasi, sistem *online trading* dalam perdagangan saham di pasar modal juga menjadi cara untuk mendongkrak literasi sekaligus menaikkan jumlah investor. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta adanya 250 juta pelanggan telepon seluler. Sistem teknologi dan informatika (TI) dan kepemilikan handphone akan menjadi medium yang efektif bagi perbankan yang saat ini mulai gencar mengimplementasikan sistem tanpa kantor cabang (*branchless banking*) untuk daerah terpencil.

OJK melihat rendahnya tingkat literasi masyarakat pada sektor jasa keuangan menjadi penyebab partisipasi mereka di pasar modal juga rendah, terbukti dari rendahnya persentase jumlah penduduk Indonesia yang berinvestasi di pasar modal, apalagi layanan informasi mengenai pasar modal ditengah masyarakat juga terbatas. Belum lagi adanya perasaan traumatis dan persepsi negatif terhadap layanan keuangan khususnya pasar modal yang pernah dialami sendiri atau dari cerita orang-

orang yang pernah mengalami kasus penipuan di pasar modal. Sebagai bagian dari industri jasa, kunci keberhasilan pasar modal untuk menarik hati masyarakat adalah pada kualitas pelayanan seperti tersedianya unit pengaduan. Masyarakat yang dilayani dengan baik akan semakin tertarik untuk berinvestasi di pasar modal (Apriyani, 2015).

Akibat yang jelas dari rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap sektor keuangan dan pasar modal adalah adanya potensi yang besar bagi masyarakat untuk meningkat lebih cepat perekonomiannya menjadi terhambat, karena prospek investasi di pasar modal dengan tingkat keuntungan yang tinggi tidak dapat terutilisasi dengan optimal. Secara agregat (makro), ada potensi pertumbuhan ekonomi yang semestinya bisa memacu pertumbuhan lebih tinggi tidak berfungsi dengan optimal, akibatnya adalah ekonomi hanya tumbuh pada tingkat yang moderat saja yaitu dikisaran 5 persen. Diperkirakan jika pasar modal Indonesia ini sudah terutilisasi dengan optimal, efek akselerasinya bisa memacu pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7 persen per tahun.

G. Langkah-Langkah Pemerintah

1) Trilogi Instrumen Kebijakan OJK

OJK sebagai salah satu diantara unit trisula sektor keuangan di tanah air bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, berperan penting dalam mengembangkan sektor keuangan. Pada gambar 5 terlihat trilogi instrumen kebijakan OJK yaitu inklusi keuangan, literasi keuangan (termasuk pasar modal) dan perlindungan konsumen.

Trilogi kebijakan OJK dilakukan agar sektor keuangan tumbuh secara berkelanjutan dan terjadi pemberdayaan konsumen. Kalau kedua hal bisa dilaksanakan dengan baik, maka target akhir dari trilogi kebijakan OJK berupa (i) pertumbuhan

²² Suparji, *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia Fakultas Hukum, 2010.

ekonomi, (ii) pengentasan kemiskinan dan (iii) pemerataan pendapatan, bisa dicapai.

Pasar modal yang merupakan bagian dari sektor keuangan, berpotensi besar untuk berkontribusi dalam pencapaian target tersebut karena potensinya sangat besar namun belum dikembangkan dengan optimal. Berdasarkan *best practice* di berbagai negara, pasar modal merupakan sumber pendanaan kedua terbesar setelah perbankan. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih fokus dan bersungguh-sungguh untuk membesarkan pasar modal Indonesia yang saat ini peranannya sebagai sumber *financing* baru mencapai 47persen dari PDB.

2) Tiga Pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan

Jika melihat ke berbagai Negara, banyak negara telah memiliki strategi nasional literasi keuangan (*National Strategy on Financial Literacy*) sehingga usaha untuk memperluas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penggunaan layanan jasa keuangan menjadi terstruktur, sistematis, efektif dan efisien. Contoh negara-negara tersebut adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, India dan Kanada.

Indonesia juga memiliki strategi nasional seperti beberapa negara tersebut yaitu yang diberi nama tiga pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan yakni: (i) literasi keuangan, (ii) penguatan infrastruktur literasi keuangan dan (iii) pengembangan produk dan jasa keuangan (gambar 6).

Gambar 6. Tiga pilar strategi nasional.



Sumber Agus Sugiarto.²³

Terkait dengan pilar pertama Literasi Keuangan, OJK menggelar Pasar Keuangan Rakyat (PKR) sebagai rangkaian acara peluncuran layanan keuangan mikro. PKR merupakan salah satu bentuk implementasi cetak biru strategi nasional literasi keuangan Indonesia yaitu edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Penyelenggaraan PKR tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan memperkenalkan industri jasa keuangan beserta produk dan jasa keuangan, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah.

²³ Agus Sugiarto, 2014, "Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia", (*online*), (<http://medanbisnisdaily.com>, *online*, diakses pada 5 Maret 2016).

Selain itu juga untuk memperluas akses masyarakat (*financial inclusion*) terhadap lembaga jasa keuangan sekaligus menggunakan produk dan jasa keuangan yang ada.²⁴

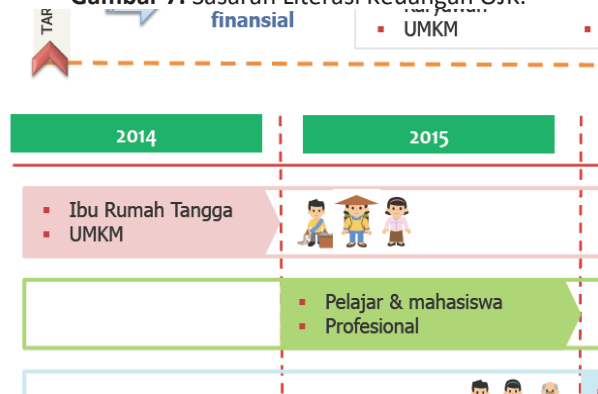
Masih dalam rangka Literasi Keuangan, OJK juga telah meluncurkan program Strategi Nasional Literasi Keuangan pada 19 November 2013 bersama Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan dari seluruh industri keuangan (perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, pegadaian dan dana pensiun). OJK bertekad dengan program literasi tersebut bisa mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (*well literate*) sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan.

Sesuai cetak biru dari OJK (gambar 6), sasaran literasi keuangan dilakukan secara bertahap, dari berbagai kalangan. Sasaran pada 2014 ditekankan pada kalangan ibu rumah tangga (IRT) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pada tahun 2015 sasaran literasi adalah pelajar, mahasiswa dan kalangan profesi. Pada tahun 2016 menyasar pada kalangan karyawan dan pensiunan. Alasan ibu rumah tangga yang menjadi prioritas, karena di Indonesia umumnya ibu rumah tangga yang memegang kendali keuangan rumah tangga.²⁵

²⁴ PKR yang diselenggarakan oleh OJK diikuti oleh 244 pelaku usaha jasa keuangan dari 6 industri jasa keuangan dan lembaga/asosiasi, yang terdiri dari 70 Bank, 61 Perusahaan Asuransi, 52 Perusahaan Sekuritas termasuk Manajer Investasi, 40 Perusahaan Pembiayaan, 1 Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Pegadaian dan 19 Lembaga lainnya (Otoritas, Asosiasi industri jasa keuangan dan lainnya).

²⁵ Berdasarkan survei yang dilakukan OJK, tingkat literasi IRT baru 2.18 persen, sementara tingkat utilitasnya juga baru pada angka 3.37 persen. Padahal, berdasarkan sensus pada tahun 2010, dari 237,6 juta penduduk Indonesia, sebanyak 49 persen atau 118 juta penduduk adalah perempuan dan 74 juta di antaranya adalah ibu rumah tangga. Terkait dengan program ini, OJK Regional 4 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjalin kerjasama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai produk dan lembaga jasa keuangan). Kusumaningtuti S. Soetiono, 2014, "Memperkuat Pengawasan Keuangan Melalui Literasi Masyarakat", (*online*), (http://www.antarajatim.com/berita/143074/memperkuat-pengawasan-keuangan-melalui-literasi-masyarakat?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news diakses pada 7Maret 2016).

Gambar 7. Sasaran Literasi Keuangan OJK.



Sumber: Muliaman Hadad²⁶

Berdasarkan data Kementerian Koperasi jumlah UMKM sebanyak 56.5 juta unit dan 98.9 persennya adalah usaha mikro, sedangkan jumlah koperasi mencapai 200.808 unit. Dalam melakukan literasi OJK tidak bekerja sendiri, tapi bekerjasama dengan lembaga lain pelaku jasa keuangan baik yang konvensional maupun syariah.²⁷

Terkait dengan pilar kedua (infrastruktur), OJK akan meningkatkan peran bursa pasar modal sebagai sumber pendanaan agar pendanaan untuk pengembangan usaha di Indonesia tidak hanya berbasis perbankan. Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman Hadad pada pertemuan ramah tamah dengan masyarakat Indonesia di London dan sekitarnya yang diadakan KBRI London,²⁸ saat ini OJK telah menyiapkan infrastruktur yang diperlukan dari sisi peraturan, teknologi informasi yang mendukung dan sumber daya manusia yang berkualitas. OJK juga mempunyai misi untuk memperluas akses masyarakat kepada sumber-sumber pendanaan (*financial inclusion*) baik yang bersumber dari sektor perbankan maupun sektor nonbank.

Masih berkaitan dengan pengembangan infrastruktur, OJK meluncurkan dua program yaitu: (i) pengembangan identitas tunggal pemodal atau *Single Investor Identification (SID)* dan (ii) pengembangan data dan informasi *warehouse* dengan menyusun struktur kode *Single Investor Identification (SID)*

dan melakukan sinkronisasi atas data investor reksa dana dari bank kustodian, APRDI²⁹ dan manajer investasi.”³⁰

Terkait dengan pilar ketiga (Pengembangan Produk), OJK mengembangkan produk-produk dalam pasar modal yaitu: (i) Revitalisasi perdagangan produk derivatif dengan melakukan *review* terhadap peraturan bursa terkait kontrak berjangka indeks efek dan kontrak opsi saham. (ii) Memaksimalkan penggunaan *bond index* dengan melakukan pengkajian *bond index* sebagai parameter perkembangan perdagangan surat utang dan sukuk. (iii) Pengembangan kerangka regulasi produk syariah (iv) pengembangan produk pengelolaan investasi yang sesuai selera pasar dan (v) mengupayakan insentif pajak atas kupon obligasi di reksa dana.³¹

OJK juga menerbitkan buku dengan judul “Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan” yang menjelaskan segala aspek yang berkaitan dengan sektor keuangan dan Pasar Modal dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sektor keuangan dan peluang investasi di sektor ini.³²

H. Langkah-Langkah Pihak Terkait

Prestasi Junior Indonesia (PJI), organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan kewirausahaan, kesiapan dunia kerja dan kesadaran finansial menggelar program literasi keuangan bertajuk “Anak Cerdas.” Program ini didukung oleh bank HSBC bertujuan mendorong anak untuk lebih memahami nilai-nilai keuangan dan pengelolaannya sejak usia sekolah dasar. Program Anak Cerdas merupakan bagian dari rangkaian investasi kemasyarakatan HSBC yang dilakukan secara global sekaligus menandai ulang-tahunnya ke-150.³³

Edukasi keuangan perlu dilakukan sejak dini agar masyarakat semakin melek dan dapat menggunakan jasa keuangan nonbank (berinvestasi) sehingga

²⁶ Disampaikan pada kuliah umum Universitas Bakrie Jakarta, 22 Desember 2014.

²⁷ OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/EDOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat. Untuk mengedukasi dan membuat masyarakat melek keuangan tentu saja membutuhkan stamina dan waktu yang cukup. Program literasi ini harus masif, sistematis dan berkelanjutan agar memberikan hasil yang maksimal.

²⁸ “OJK kembangkan peran bursa sebagai sumber pendanaan”, (*online*), (*Antarnews.com, online*, diakses pada 16 Maret 2016).

²⁹ APRDI adalah Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia

³⁰ Nurhaida, 2013, “Lima Cara Pengembangan Pasar Modal Ala OJK”, (*online*), (*hukumonline.com*, diakses pada 3 Maret 2016).

³¹ *Ibid.*

³² Otoritas Jasa Keuangan, *Buku saku Otoritas Jasa Keuangan*, edisi 2, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

³³ Prestasi Junior Indonesia (PJI) Menggandeng Bank HSBC menggelar Program “Anak Cerdas”. HSBC berkomitmen untuk menyumbang dana sebesar 150 juta dollar AS guna mendukung program-program kemasyarakatan selama tiga tahun (2015-2017) di seluruh dunia. Program Anak Cerdas digelar di 31 Sekolah Dasar di 12 kota di Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Manado dan Pontianak. Bentuk pengajaran sepintas mengadopsi nilai-nilai yang sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sesungguhnya aspek yang mampu disentuh oleh program literasi keuangan Anak Cerdas ini sangat luas.

tidak terjebak pada pola hidup konsumtif. Bila pemahaman mengenai keuangan dan pengelolannya ini sudah tertanam sejak dini, generasi muda mampu mempersiapkan masa depan mereka dengan baik sejak awal. Karenanya literasi keuangan sejak usia dini penting dilakukan mengingat saat ini zaman sudah sangat kompetitif dan pola hidup juga sudah sangat konsumtif. Kalau anak-anak sudah memiliki literasi keuangan sejak dini, mereka akan memahami nilai-nilai yang berkaitan dengan uang seperti darimana uang berasal, bagaimana mendapatkannya dengan benar dan bagaimana mengelolanya dengan baik.³⁴

Berkaitan dengan edukasi masyarakat tentang uang, BEI, PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kurtodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bekerjasama meluncurkan sebuah program yang dinamakan *Capital Market Professional-Development Program (CMP-DP)*. Sejak peluncurannya pada 9 November 2015 lalu, program ini berhasil menggaet sebanyak 4.200 pendaftar secara nasional dan telah dilakukan seleksi tertulis secara serentak di 20 kota besar Indonesia pada tanggal 16 Januari 2016.³⁵

I. Solusi Masalah

Pada bagian sebelum ini telah diidentifikasi cukup banyak permasalahan yang berkaitan dengan tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal yaitu: (1), Kendala SDM di OJK dan SRO (KSEI, KPEI dan BEI) untuk sosialisasi pasar modal ke masyarakat. (2), *Prejudice* masyarakat terhadap pasar modal. (3), Kebiasaan menabung baik di bank maupun pada aset berupa tanah dan emas. (4), Infrastruktur pasar modal yang belum memadai.

Untuk masalah nomor (1), solusinya adalah melakukan *training* dan *capacity building* kepada staf pegawai di OJK, BEI, KSEI, KPEI agar lebih menguasai pengetahuan mengenai pasar modal, meliputi pengetahuan substansial dan peraturan-peraturan terkait dengan pasar modal, yang nantinya dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Dapat juga dilakukan *recruitment* pegawai baru yang sudah berpengalaman dalam pasar modal. Untuk masalah nomor (2), solusinya adalah sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, elektronik dan surat kabar, *workshop* dan seminar, pasar rakyat, kuliah masal di perguruan tinggi dan tingkat sekolah lanjutan untuk memperbaiki prasangka masyarakat

yang terlanjur buruk kepada pasar modal. Untuk masalah nomor (3), solusinya adalah hampir sama dengan yang kedua yaitu sosialisasi agar masyarakat bisa melihat tingkat keuntungan yang lebih besar yang akan mereka peroleh dengan berinvestasi di pasar modal dibandingkan dengan menabung. Untuk masalah nomor (4), solusinya adalah OJK dan SRO perlu membangun lebih banyak lagi kantor dan perwakilan di daerah untuk bisa lebih *massive* melakukan sosialisasi dan diseminasi pasar modal kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia, tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari studi ini adalah sebagai berikut: Pertama, tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal masih sangat rendah. Hal ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pasar modal. Kedua, penyebab dari rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal adalah: (i) Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa untuk bertransaksi di pasar modal memerlukan modal besar (ratusan juta bahkan miliaran rupiah), (ii) kurangnya pengetahuan teknis mengenai pasar modal, (iii) persepsi masyarakat bahwa transaksi di bursa pasar modal bersifat judi dan mengandung riba yang hukumnya haram, (iv) adanya kejadian-kejadian yang merugikan para investor saham di bursa akibat adanya penipuan yang dilakukan oleh para pialang dimasa lalu menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat bahwa bermain saham di bursa rentan terhadap penipuan, (v) jumlah dan kualitas SDM di OJK dan SRO yang belum memadai dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal. Ketiga, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat terhadap pasar modal seperti: (i) trilogi instrumen kebijakan OJK yaitu inklusi keuangan, literasi keuangan (termasuk pasar modal) dan perlindungan konsumen, (ii) kebijakan tiga pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan yakni: literasi keuangan, penguatan infrastruktur literasi keuangan dan pengembangan produk dan jasa keuangan, (iii) penyertaan pemerintah daerah dan institusi non pemerintah dalam melakukan sosialisasi sektor keuangan dan pasar modal kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), KSEI, KPEI dan lembaga masyarakat non pemerintah lainnya seperti perbankan dan organisasi nir laba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka ada beberapa saran yang diusulkan dari hasil kajian ini, yaitu:

³⁴ Anggota Badan Nasional Prestasi Junior Indonesia

³⁵ Selly Astari Octaviani, 2016. "BEI: Tingkat Literasi Pasar Modal di Indonesia Masih Rendah". (*online*), (*bandung.bisnis.com*, diakses pada 17 Maret 2016). Adapun 20 kota tersebut adalah Jakarta, Balikpapan, Aceh, Bandung, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Jambi, Jayapura, Lampung, Makassar, Manado, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Riau.

OJK dan *Self Regulatory Organiation (SRO)* seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) perlu terus mensosialisasikan pasar modal sebagai tempat berinvestasi kepada masyarakat dan juga meningkatkan jumlah SDM yang berkualitas untuk meningkatkan kemampuan mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi pasar modal sebagai tempat investasi yang lebih menguntungkan.

Sosialisasi pasar modal yang sudah dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti perbankan, pemda dan lembaga sosial lainnya dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Pemerintah dan OJK perlu terus mengawal kebijakan disektor keuangan dan pasar modal dengan cara membuat kebijakan yang bersifat terobosan agar terjadi peningkatan tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal yang lebih tinggi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Buku Mengenal Jasa Keuangan Tingkat Sekolah Dasar*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Buku saku Otoritas Jasa Keuangan*, Edisi 2. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Supardji. (2010). *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia Fakultas Hukum.

Jurnal:

Chen, Haiyang and Ronald P. Volpe. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students, *Financial Services Review*, 7(2).

Lusardi & Mitchell. (2007). Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education. *Business Economics*. January 2007.

Mar'ati, Fudji Sri. (2010). Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok Dan Proses Go Public). *Among Makarti*, Vol.3 No.5 Juli.

Murni, Seri, Muhammad Arfan, Said Musnadi. (2014). Pengaruh Earning per Share dan Net Profit Margin terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 1.

Widayati, I. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi finansial mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume 1, Nomor 1, Oktober.

Laporan Hasil Penelitian dan Proceeding.

Isnurhadi, H. (2013). "Kajian Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah. (Studi Kasus: Masyarakat Kota Palembang)". Laporan Hasil Penelitian, Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Kardinal, 2015. "Kontribusi Literasi Keuangan Terhadap Penggunaan Produk Keuangan Pada Masyarakat Indonesia", STIE Multi Data Palembang, Proceeding Sriwijaya Economic and Business Conference 2015.

Lusardi & Mitchell. 2010. "*Financial Literacy among the Young: Evidence and Implications for Consumer Policy*". The research conducted pursuant to a grant from the U.S. Social Security Administration (SSA) to the Michigan Retirement Research Center.

Artikel Internet:

Apriyani. 2015. "Jumlah Investor Pasar Modal Yang Aktif Hanya 37 persen", (*online*) (Infobanknews.com, diakses pada 21 Maret 2016).

Basirun, Adikin. 2013. "BEI Dan Anggota Bursa (AB) Dorong Masyarakat Melek Investasi Pasar Modal", (*online*), (bnisecurities.co.id, diakses 20 Maret 2016).

"BEI: Tingkat Literasi Pasar Modal di Indonesia Masih Rendah", (*online*), (bandung.bisnis.com, diakses pada 17 Maret 2016)

Hadad, Muliaman. 2015. "OJK kembangkan peran bursa sebagai sumber pendanaan", (*online*), (Antaraneews.com, diakses pada 16 Maret 2016).

- “Literasi Pasar Modal Paling Rendah 3,79%”, (*online*), (<http://www.neraca.co.id/>), diakses pada 5 Maret 2016).
- Mahardika, Jauhari. 2015. “BEI Gencar Tingkatkan Literasi Pasar Modal”, (*online*), (Beritasatu.com), diakses pada 14 Maret 2016).
- Maududy, Irsyan. 2015. “Kebijakan Meningkatkan Literasi Keuangan”, (*online*), (<http://bemfebui.com>), diakses pada 10 Maret 2016).
- Nurhaida. 2013. “Lima Cara Pengembangan Pasar Modal Ala OJK”, (*online*), (hukumonline.com), diakses pada 3 Maret 2016).
- Soebagjo, Natalia. 2015. “Anak Cerdas”, Program Pengajaran terhadap anak-anak Sekolah Dasar (di berbagai kota). Prestasi Junior Indonesia (PJI) bekerjasama dengan Bank HSBC, (*online*), (www.prestasijunior.org), diakses pada 16 Maret 2016).
- Soetiono, Kusumaningtuti N. 2016. “OJK Paling Banyak Terima Pengaduan soal Kredit”, (*online*), (<http://edukasi.kompas.com>), diakses pada 9 Maret 2016).
- “Tingkatkan Kualitas SDM, OJK Gandeng BNSP”, (*online*), (hukumonline.com), diakses pada 17 Maret 2016).

Sumber lainnya:

- Dewi, Meutia Karunia et.al. (2015). Telaah Finansial Literasi Mahasiswa Feb Universitas Jenderal Soedirman: Suatu Implikasi Pembelajaran Di Perguruan Tinggi, *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Hadad, Muliaman. 2014. “Membuka Akses dan Melindungi Konsumen Keuangan”, Kuliah Umum Universitas Bakrie, Jakarta, 22 Desember 2014.
- Mulyadi, Endang. (2008). Pasar Modal Berbasis Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X”. *Modul Pembelajaran SMA Negeri I Ciamis*.